

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PESAWARAN 2016 / 2017



UMUR PANJANG DAN
HIDUP SEHAT



PENGETAHUAN



STANDAR HIDUP
LAYAK



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PESAWARAN 2016 / 2017



UMUR PANJANG DAN
HIDUP SEHAT



PENGETAHUAN



STANDAR HIDUP
LAYAK



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN PESAWARAN
2016/2017**

ISBN : 978-602-632-939-4

Nomor Publikasi : 18090.1717

Katalog BPS : 4102002.1809

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 52 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Gambar Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Dicetak Oleh :

CV. Jaya Wijaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semakin pesatnya pembangunan di berbagai aspek di era otonomi daerah ini, maka semakin terasa perlu data statistik mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pesawaran. Penyajian IPM ini diharapkan dapat memacu kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran 2016/2017” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Gedong Tataan, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesawaran

Wintarti Dyah Indriani, S.E.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Sistematika Penulisan	4
BAB II Metode Penghitungan IPM	7
2.1. Sejarah Penghitungan IPM.....	9
2.2. Konsep dan Definisi	12
BAB III Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran	21
3.1. Kondisi Geografis	23
3.2. Kependudukan	25
3.3. Perekonomian	26
BAB IV Analisis Indeks Pembangunan Manusia	33
4.1. Status Pembangunan Manusia	35
4.2. Perbandingan IPM Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	37
4.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Maksimum dan Minimum yang Digunakan dalam Penghitungan IPM	13
Tabel 3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, 2016.....	23
Tabel 3.2	Nama Ibukota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Pesawaran, 2016	24
Tabel 3.3	Struktur Ekonomi (PDRB ADHB) Kabupaten Pesawaran, 2014-2016 (Persen).....	29
Tabel 4.1	Indeks dan Status Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran, 2014-2016	36
Taebel 4.2	Komponen Penyusun IPM Kabupaten Pesawaran, 2014-2016.....	37
Tabel 4.3	Perbandingan Nilai dan Rangking IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2014-2016.....	38
Tabel 4.4	Indeks Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015-2016	40
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pesawaran, 2015-2016.....	47
Tabel 4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pesawaran, 2015-2016	48
Tabel 4.7	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran, 2015-2016	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kategori Capaian IPM.....	12
Gambar 2.2	Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran Per Kapita.....	17
Gambar 3.1	Piramida Penduduk Kabupaten Pesawaran, 2016.....	26
Gambar 3.2	Perkembangan PDRB Kabupaten Pesawaran, 2014-2016.....	27
Gambar 3.3	PDRB Per Kapita Kabupaten Pesawaran, 2014-2016.....	28
Gambar 4.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung, 2012-2016.....	36
Gambar 4.2	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016.....	39
Gambar 4.3	AHH Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung, 2012-2016.....	41
Gambar 4.4	AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016.....	42
Gambar 4.5	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesawaran, 2012-2016.....	44
Gambar 4.6	HLS Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016.....	45
Gambar 4.7	RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016.....	46
Gambar 4.8	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Pesawaran, 2012-2016 (000 Rupiah).....	51
Gambar 4.9	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016.....	52

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sebelum Tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena saja (Todaro dan Smith). Namun pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup sebagian besar penduduknya. Pada tahun 1991, Bank Dunia menerbitkan laporan yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan” (*World Development Report*). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi. Selain memperhitungkan aspek pendapatan, juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal tersebut merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Namun, seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report*, 1990).

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

Konsep pembangunan manusia berbeda dari konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Selain itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Pada tahun 1990, UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan pengukuran pembangunan manusia pertama kali. Sebuah gagasan baru yang diperkenalkan UNDP dalam pengukuran pembangunan manusia disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM

dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM menurut UNDP mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Penyusunan IPM menggunakan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan yang mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

1.2 Tujuan

BPS selama ini berusaha menyediakan data statistik di berbagai sektor dan kegiatan, seperti di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya, baik melalui kegiatan sensus maupun survei. Tujuan diterbitkannya Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran Tahun 2016/2017 antara lain:

- a. Meningkatkan wawasan tentang konsep pembangunan manusia.
- b. Memperkenalkan IPM kepada masyarakat dan media.
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.
- d. Mengetahui perkembangan tingkat hidup manusia atau level pembangunan antar wilayah/daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran ini diawali dengan Bab I, pendahuluan yang membahas latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan. Bab II mengupas tentang metode penghitungan IPM, yang berisi sejarah penghitungan IPM, serta konsep dan definisi. Bab III membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Pesawaran yang mengulas tentang kondisi geografis, kependudukan, dan perekonomian. Terakhir, Bab IV yakni analisis indeks pembangunan manusia yang membahas status pembangunan manusia, perbandingan IPM Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, serta komponen indeks pembangunan manusia.



BAB II
METODE PENGHITUNGAN
IPM

<https://pesawarankab.bps.go.id>

Fenomena atau masalah yang terjadi dimasyarakat menuntut kita untuk merumuskan adanya ukuran baku. Ukuran tersebut sebaiknya berupa agregat agar dapat digunakan untuk menjelaskan sekaligus beberapa indikator. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka disusunlah indeks agregat yaitu indeks pembangunan manusia. IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif.

2.1. Sejarah Penghitungan IPM

Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan penghitungan IPM pada tahun 1991 dan 1995, serta perubahan di 2010. Pada mulanya, tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Kemudian, IPM secara rutin, setiap tahun, dipublikasikan dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Saat itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir; dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa; serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Selang setahun, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Sehingga, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kemudian, UNDP memberi bobot pada dua indikator dalam dimensi pengetahuan tersebut. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM kali ini sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan

indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Untuk menghitung indeks komposit, metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik.

Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbaiki penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru tersebut, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru, terdapat 96 komoditas yang digunakan, dengan perincian 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui. Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada

metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

2.2. Konsep dan Definisi

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Secara umum, IPM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (1)$$

Nilai indeks dari hasil penghitungan masing-masing dimensi tersebut berkisar antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam publikasi ini, indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM.

Gambar 2.1. Kategori Capaian IPM



Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih menggunakan ketiga dimensi di atas, yaitu dimensi kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan usia harapan hidup (*life expectancy at age 0; e⁰*); dimensi pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator, yaitu harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*); dan dimensi standar hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh *Purchasing Power Parity (PPP)*/Paritas Daya Beli. Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan pendekatan pengeluaran per kapita penduduk.

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum yang Digunakan dalam Penghitungan IPM

Indikator IPM	Nilai		Keterangan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (AHH)	85	20	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

2.2.1. Dimensi Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) atau *Life Expectancy-e⁰* saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan hasil proyeksi SP2010.

Pada indikator AHH, angka tertinggi sebagai batas atas penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan batas bawahnya adalah 20 tahun. Batas maksimum minimum AHH mengacu pada UNDP untuk keterbandingan global. Indeks Kesehatan dirumuskan sebagai berikut.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \quad (2)$$

Keterangan:

- $I_{kesehatan}$ = indeks Kesehatan
- AHH = angka harapan hidup
- AHH_{min} = angka harapan hidup minimum, yaitu 20 tahun
- AHH_{maks} = angka harapan hidup maksimum, yaitu 85 tahun

2.2.2. Dimensi Pendidikan

Pengukuran dimensi pengetahuan penduduk menggunakan dua indikator. Kedua indikator tersebut, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS).

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i \quad (3)$$

Keterangan:

- RLS = rata-rata lama sekolah
- Lama sekolah penduduk = lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah

n = Jumlah penduduk (i=1,2,3,...,n)

Indikator rata-rata lama sekolah menghasilkan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks rata-rata lama sekolah dirumuskan sebagai berikut.

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \quad (4)$$

Keterangan:

I_{RLS}	= indeks rata-rata lama sekolah
RLS	= rata-rata lama sekolah
RLS_{min}	= rata-rata lama sekolah, yaitu 0 tahun
RLS_{maks}	= rata-rata lama sekolah maksimum, yaitu 15 tahun

Data indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, angka harapan lama sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren tersebut diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \quad (5)$$

Keterangan:

HLS_a^t	: Harapan Lama Sekolah
E_i^t	: Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i^t	: Jumlah Penduduk usia i pada tahun t
i	: Usia (a,a+1, ..., n)
FK	: Faktor koreksi pesantren

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1 \quad (6)$$

Keterangan :

- Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim x jumlah santri sekolah
- Rasio santri mukim = jumlah bermukim/jumlah santri seluruhnya

Dari kedua indeks di atas, maka indeks pengetahuan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$I_{\text{Pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2} \quad (7)$$

Keterangan:

- $I_{\text{Pengetahuan}}$ = indeks pengetahuan
- I_{HLS} = indeks harapan lama sekolah
- I_{RLS} = indeks rata-rata lama sekolah

2.2.3. Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (8)$$

Keterangan:

- PPP_j : Paritas daya beli di wilayah j
- p_{ik} : Harga komoditas i di Jakarta Selatan
- p_{ij} : Harga komoditas i di Kabupaten/Kota j
- m : jumlah komoditas

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})} \quad (9)$$

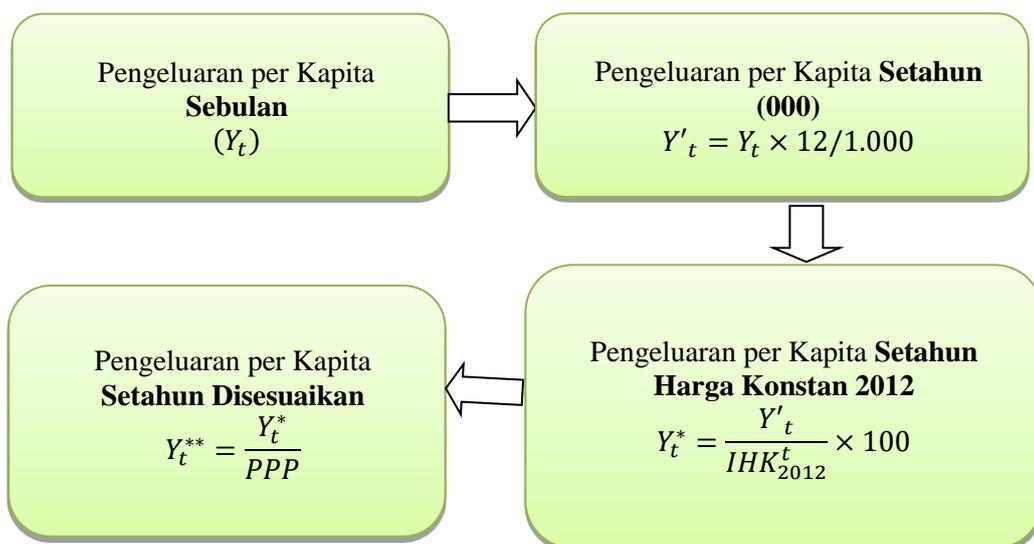
Keterangan:

- $I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks pengeluaran
- $\ln(\text{pengeluaran})$ = \ln pengeluaran per kapita disesuaikan
- $\ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})$ = $\ln 1.007.436$
- $\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}})$ = $\ln 26.572.352$

Secara umum teknis penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari data Susenas.
- b. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan.
- c. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012.
- d. Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP).
- e. Menghitung pengeluaran per kapita setahun disesuaikan dengan membagi rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012 dan Paritas Daya Beli.

Gambar 2.2. Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran per Kapita



2.2.4. Pertumbuhan IPM

Kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu diukur dengan menggunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (10)$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$



BAB III
GAMBARAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

<https://pesawarankab.bps.go.id/>

3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pesawaran terbentang pada posisi 104,92⁰ – 105,34⁰ Bujur Timur dan 5,12⁰ – 5,84⁰ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Pesawaran, secara administratif, sebesar 1.173,77 km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pesawaran sebagai berikut.

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung, Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, 2016

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas (km ²) <i>Total Area (square.km)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
1. Punduh Pidada	113,19	9,64
2. Marga Punduh	111,00	9,45
3. Padang Cermin	127,34	10,85
4. Teluk Pandan	77,34	6,59
5. Way Ratai	112,95	9,62
6. Kedondong	67,00	5,71
7. Way Khilau	64,11	5,46
8. Way Lima	99,83	8,51
9. Gedong Tataan	97,06	8,27
10. Negeri Katon	152,69	13,01
11. Tegineneng	151,26	12,89
Pesawaran	1 173,77	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pesawaran

Kabupaten Pesawaran terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 144 desa. Ibukota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan.

Tabel 3.2. Nama Ibukota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Pesawaran, 2016

Kecamatan	Ibukota	Banyaknya Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Punduh Pidada	Bawang	11
Marga Punduh	Sukajaya Punduh	10
Padang Cermin	Wates Way Ratai	11
Teluk Pandan	Hurun	10
Way Ratai	Way Ratai	10
Kedondong	Kedondong	12
Way Khilau	Kubu Batu	10
Way Lima	Batu Raja	16
Gedong Tataan	Gedong Tataan	19
Negeri Katon	Negeri Katon	19
Tegineneng	Trimulyo	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Kondisi permukaan bumi atau tofografi Kabupaten Pesawaran merupakan daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Sebagian wilayah merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0-1.682 meter. Wilayah Kabupaten Pesawaran, secara geologi, terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa tersier dan kuartar.

Berdasarkan fisiografis, Kabupaten Pesawaran terbagi ke dalam 7 grup, yaitu: pegunungan, perbukitan, volkan, dataran, dataran tuff masam, marin, dan alluvial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2008, potensi pergerakan tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu potensi rendah dan menengah. Kemampuan pergerakan struktur tanah di wilayah ini dikatakan cukup stabil dalam mengantisipasi pergeseran tanah akibat longsor maupun banjir.

3.2. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016 berjumlah 431.198 jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat bahwa penduduk laki-laki (222.013 jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (209.185 jiwa).

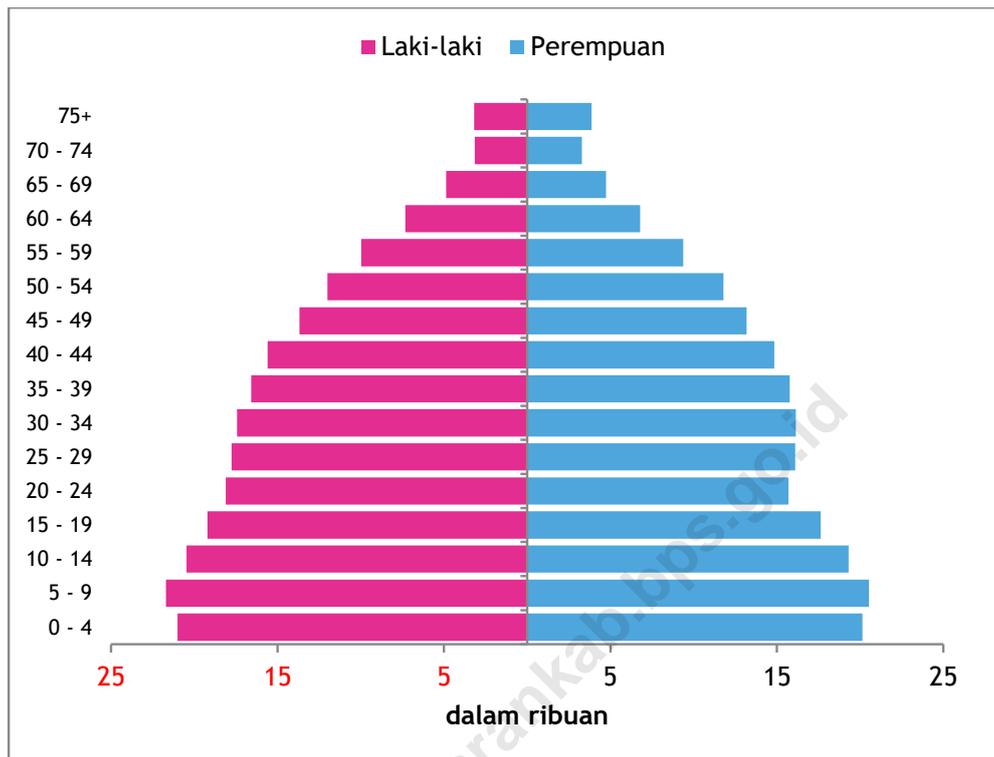
Komposisi penduduk suatu daerah dapat juga dilihat berdasarkan jenis kelaminnya. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut Rasio Jenis Kelamin atau *Sex Ratio (SR)*. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016 sebesar 106,13. Angka ini dapat diartikan bahwa pada setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat sekitar 106 penduduk laki-laki.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016 sebesar 1,13 persen per tahun. Kepadatan penduduk Kabupaten Pesawaran sebesar 192 penduduk per km². Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penambahan penduduk di daerah ini dapat dikendalikan.

Jumlah penduduk dengan umur yang sama pada suatu periode akan selalu berkurang pada periode berikutnya, dan pada akhirnya akan habis karena faktor kematian. Dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, maka persebaran penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jika digambarkan grafiknya, akan menyerupai bentuk piramida. Untuk mengamati komposisi umur menurut jenis kelamin bisa dilihat dari bentuk piramida penduduk. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Pesawaran tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Terlihat dari Gambar 3.1 bahwa penduduk Kabupaten Pesawaran tergolong penduduk muda menuju "transisi". Hal ini terlihat dari panjang batang piramida kelompok umur 0–4, 5–9, dan 10–14 tahun yang sedikit lebih panjang dari kelompok umur lainnya. Golongan penduduk muda biasanya diperlihatkan dengan batang piramida kelompok umur 0–4, 5–9, dan 10–14 tahun lebih panjang dari kelompok umur lainnya dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek.

Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Pesawaran, 2016



Sumber: Proyeksi Penduduk Lampung (2010-2035) dan Kabupaten/Kota (2010-2020)

Fenomena penduduk sebagaimana digambarkan di atas, jika tidak ditangani secara komprehensif dapat mengganggu kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pesawaran, khususnya sektor pendidikan. Dengan komposisi penduduk yang relatif lebih besar di usia muda, maka perlu dipersiapkan berbagai sarana penunjang yang lebih memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 0-14 tahun. Jika pendidikan mereka tidak ditangani dengan baik dan lebih dini, dikhawatirkan pada rentang 5-10 tahun kemudian akan berdampak cukup serius pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

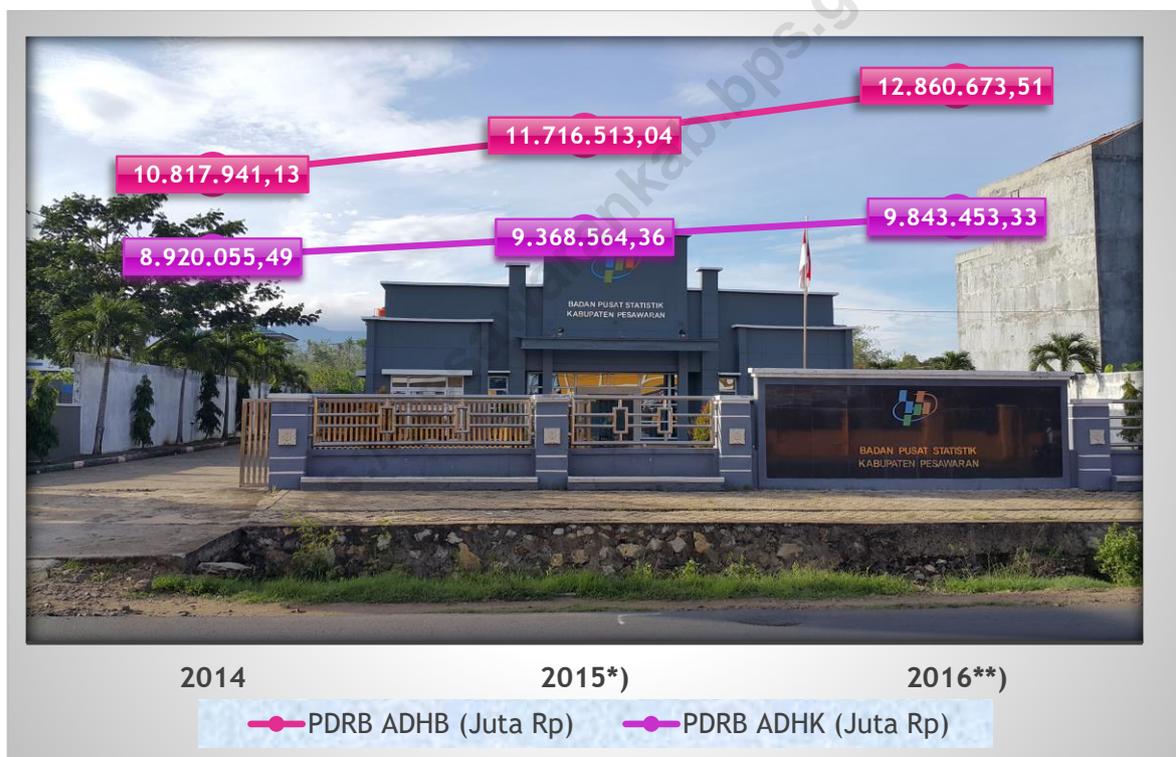
3.3. Perekonomian

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan menyajikan kontribusi dan pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB itu sendiri, akan diketahui sektor apa yang dapat dipacu perkembangannya dan mampu menampung tenaga kerja yang besar. Selain itu, juga dapat diketahui

sektor mana yang mempunyai peranan cukup besar, tetapi sudah mengalami titik jenuh (stagnasi).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur adalah perubahan produksi yang menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. Adapun harga konstan yang dimaksud adalah harga konstan tahun 2010.

Gambar 3.2. Perkembangan PDRB Kabupaten Pesawaran 2014-2016



Keterangan: *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

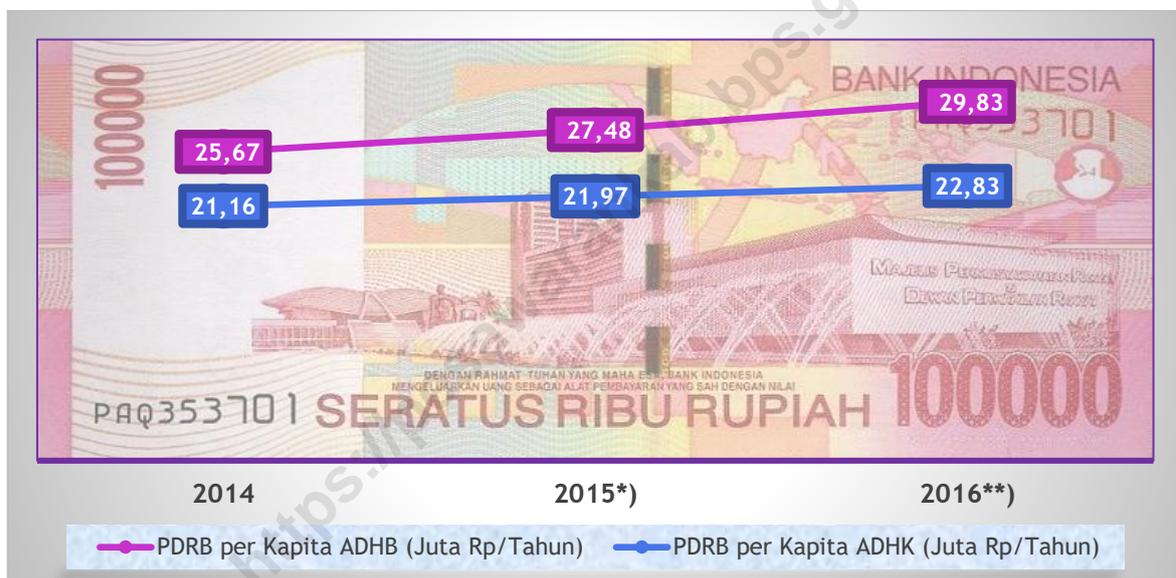
Sumber: PDRB Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir (2014-2016). Namun, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 melambat bila dibandingkan tahun 2014, yaitu sebesar 5,03 persen, yang sebelumnya 5,59 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mengalami percepatan, yaitu sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan jasa di suatu wilayah. Untuk menghitung

pertumbuhan ekonomi yang lebih dekat dengan keadaan yang sebenarnya maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu, sehingga didalamnya sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah secara makro ekonomi adalah PDRB per kapita. Indikator ini merupakan suatu konsep rata-rata pendapatan per orang dari nilai tambah bruto suatu wilayah. Penghitungan PDRB perkapita dihitung dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan penduduk pertengahan tahun.

Gambar 3.3. PDRB per Kapita Kabupaten Pesawaran 2014-2016



Keterangan: *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Perkembangan PDRB per kapita selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga angka 29,83 juta rupiah pada tahun 2016. PDRB per kapita ini memang tidak menggambarkan peningkatan pendapatan masing-masing penduduk karena masih terkandung nilai pendapatan netto yang mengalir dari/ke daerah lain, pajak tak langsung, dan penyusutan. Namun, indikator ini mencerminkan pendapatan per kapita penduduk secara rata-rata yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Tabel 3.3. Struktur Ekonomi (PDRB ADHB) Kabupaten Pesawaran
2014-2016 (Persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,49	44,53	43,86
B	Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,29	1,26
C	Industri Pengolahan	14,41	14,54	14,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,45	9,15	9,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,68	12,88	13,06
H	Transportasi dan Pergudangan	2,23	2,49	2,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,20	1,25
J	Informasi dan Komunikasi	2,80	3,04	3,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,43	0,42	0,43
L	Real Estate	1,96	1,95	1,97
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,78	3,80
P	Jasa Pendidikan	3,18	3,25	3,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,62	0,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,64	0,71	0,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Pada perhitungan PDRB, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 17 kategori. Struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total atas dasar harga berlaku (ADHB). Di Kabupaten Pesawaran, hingga tahun 2016, peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian masih

menjadi kontributor terbesar, yakni 43,86 persen. Walaupun demikian, angka tersebut terus mengalami sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perekonomian penduduk Kabupaten Pesawaran masih mengandalkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pola ini terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. *Share* sektor pertanian memang masih sangat dominan. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk menjaga sektor pertanian. Jika produksi pertanian mengalami kenaikan secara signifikan maka dimungkinkan besaran PDRB juga akan mengalami kenaikan. Demikian juga apabila produksi sektor pertanian mengalami penurunan maka besaran PDRB mempunyai kecenderungan untuk turun. Sebaliknya, peranan sektor pengadaan listrik dan gas masih sangat minim. Hal ini pun dirasakan oleh masyarakat daerah Kabupaten Pesawaran yang sering mengalami pemadaman listrik.

BAB IV

ANALISIS INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSA



Pembangunan yang hanya menitik beratkan pada sektor ekonomi dengan bertumpu pada peningkatan hasil produksi/ laju pertumbuhan ekonomi, telah terbukti tidak selalu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini karena tidak dapat mengungkap fakta vital tentang keadaan penduduk terutama yang berkaitan dengan peluang untuk hidup panjang, keterlibatan dan partisipasi dalam dunia ilmu pengetahuan, menikmati hidup secara layak bagi kemanusiaan. Sehingga terjadi pergeseran paradigma pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan manusia. Namun demikian, pembangunan manusia tidak mungkin dapat berkesinambungan tanpa dukungan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pembangunan manusia merupakan tujuan akhir, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan alat.

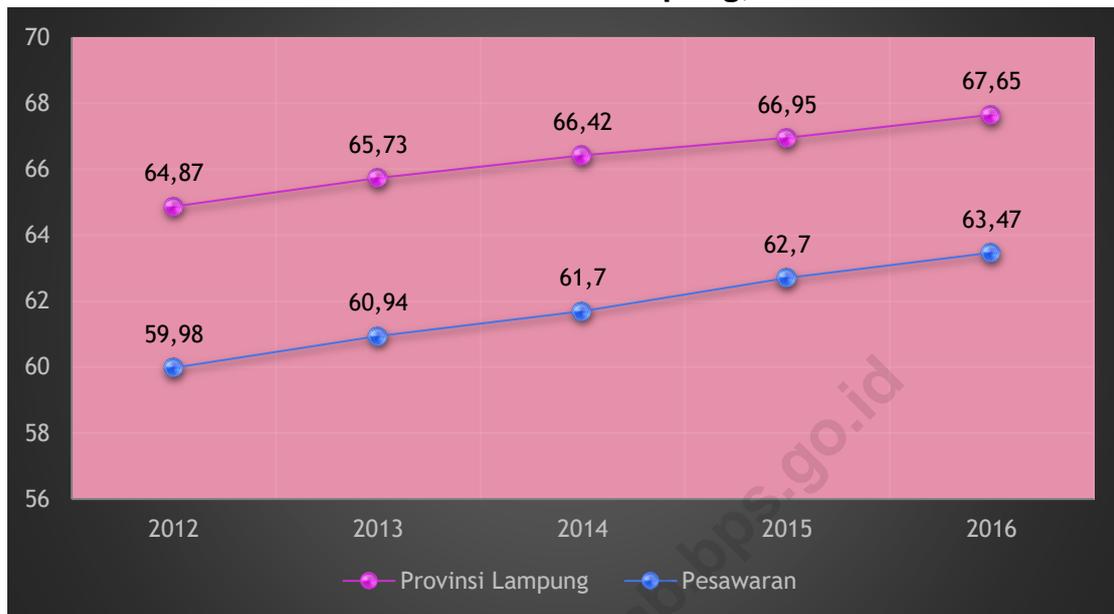
Dalam era informasi sekarang ini, otonomi daerah telah diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2004, sehingga roda pembangunan terfokus pelaksanaannya pada wilayah kabupaten/kota. Untuk itu, tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) perlu diukur pada masing-masing kabupaten/kota. Dalam pembahasan ini, kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal), yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun, indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

4.1. Status Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016 tergolong pada status “sedang”, yaitu 63,47. Angka ini lebih kecil dari pada IPM Provinsi Lampung 67,65. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Pesawaran tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, 2015, yang hanya 62,70. Perkembangan IPM sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya. Untuk meningkatkan nilai IPM, pemerintahan harus mempunyai komitmen untuk dapat meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung, 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2012-2016, nilai IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik Kabupaten Pesawaran maupun Provinsi Lampung. Namun, posisi IPM Kabupaten Pesawaran masih berada di bawah Provinsi Lampung.

Tabel 4.1. Indeks dan Status Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran 2014-2016

Tahun	IPM	Status
(1)	(2)	(3)
2014	61,70	Sedang
2015	62,70	Sedang
2016	63,47	Sedang

Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan nilai IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya. Adapun komponen-komponen penyusun IPM sangat bergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Tabel 4.2. Komponen Penyusun IPM Kabupaten Pesawaran, 2014-2016

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Daya Beli (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	67,33	11,44	7,21	6 680	61,70
2015	67,83	12,08	7,23	6 744	62,70
2016	68,05	12,25	7,24	7 055	63,47

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2. Perbandingan IPM Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah dapat dilihat dari nilai IPM sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia di daerah tersebut. Peningkatan nilai IPM di suatu daerah tidak berarti bahwa pembangunan di daerah tersebut lebih cepat dibandingkan daerah lain. Oleh sebab itu, perlu adanya keterbandingan nilai IPM antar daerah.

Selama 3 tahun berturut-turut, tahun 2014-2016, nilai IPM Kabupaten Pesawaran berada pada peringkat ke-13 di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Tidak terjadinya perubahan peringkat dalam kurun tiga tahun ini disebabkan oleh tidak ada peningkatan yang cukup berarti pada setiap komponen IPM Kabupaten Pesawaran. Selain itu, IPM di kabupaten/kota lain juga mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016, indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, IPM Kabupaten Pesawaran tumbuh sebesar 1,23 persen.

Tabel 4.3. Perbandingan Nilai dan Rangking IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2014-2016

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	63,54	64,54	65,45	10	10	10
Tanggamus	62,67	63,66	64,41	11	11	11
Lampung Selatan	63,75	65,22	66,19	9	7	7
Lampung Timur	66,42	67,1	67,88	5	5	5
Lampung Tengah	67,07	67,61	68,33	3	3	3
Lampung Utara	64,89	65,2	65,95	7	8	8
Way Kanan	64,32	65,18	65,74	8	9	9
Tulang Bawang	65,83	66,08	66,74	6	6	6
Pesawaran	61,7	62,7	63,47	13	13	13
Pringsewu	66,58	67,55	68,26	4	4	4
Mesuji	58,71	59,79	60,72	15	15	15
Tulang Bawang Barat	62,46	63,01	63,77	12	12	12
Pesisir Barat	59,76	60,55	61,5	14	14	14
Bandar Lampung	74,34	74,81	75,34	2	2	2
Metro	74,98	75,1	75,45	1	1	1
Provinsi Lampung	66.42	66.95	67.65	-	-	-

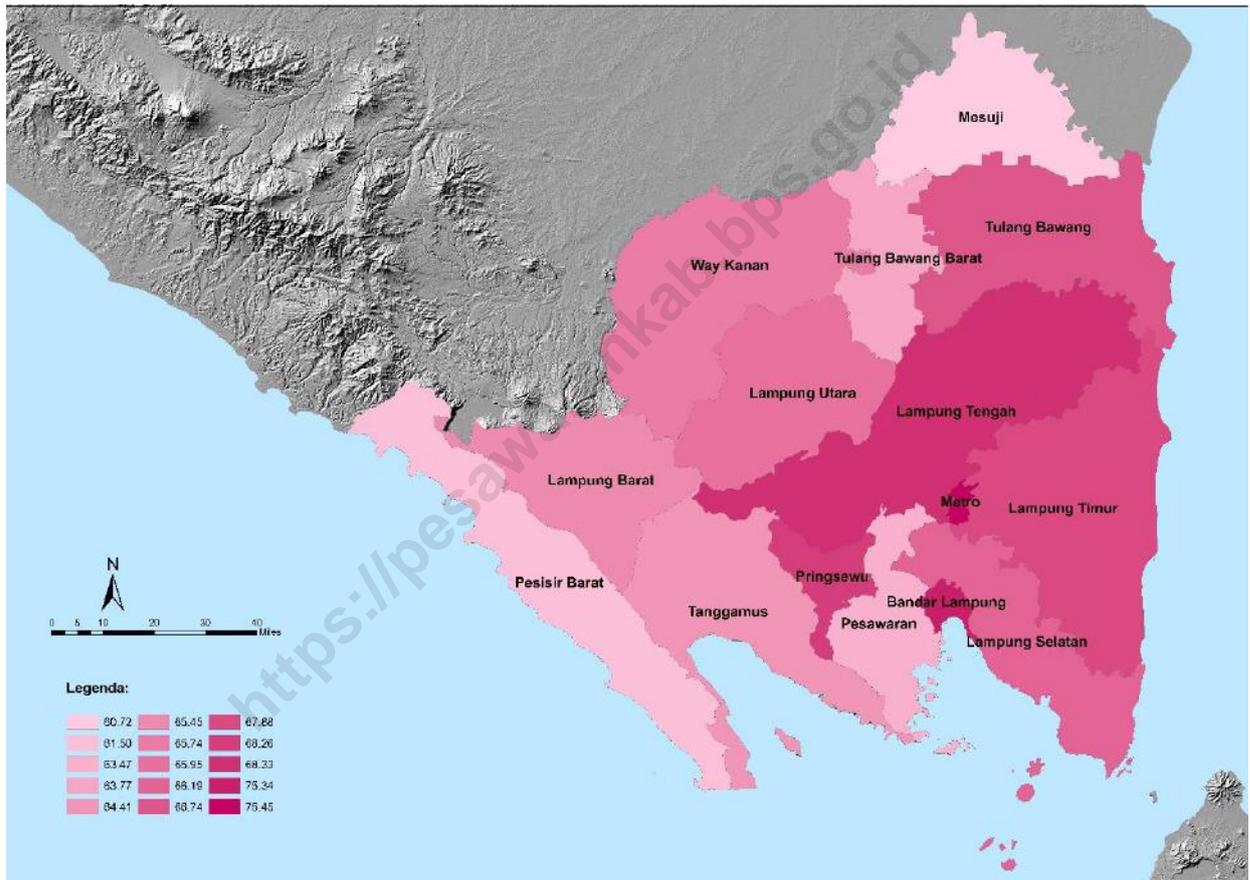
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung, IPM Kota Metro masih menduduki posisi pertama dengan nilai sebesar 75,45 pada tahun 2016. Hal ini wajar karena Metro merupakan daerah perkotaan yang memiliki banyak sekolah. Selain itu juga wilayah Kota Metro tergolong kecil. Sementara itu, Kabupaten Mesuji merupakan daerah dengan nilai IPM terendah, yakni 60,72, di Provinsi Lampung.

Apabila ditelusuri lebih jauh, wilayah yang tercatat dengan perkembangan tercepat merupakan wilayah dengan capaian IPM terendah. IPM Kabupaten Mesuji merupakan yang paling cepat perkembangannya di antara kabupaten/kota di

Provinsi Lampung, yakni sebesar 1,57 persen. Sedangkan pertumbuhan IPM yang paling lambat terjadi di Kota Metro, sebesar 0,46 persen. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi.

Gambar 4.2. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

4.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan nilai IPM harus didukung oleh peningkatan pada setiap komponen penyusunnya. Dengan demikian dapat terlihat komponen apa yang perkembangannya cukup lambat. Tabel 4.4 menguraikan lebih jauh tentang komponen pembentuk IPM tersebut serta keterbandingannya dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung.

Tabel 4.4. Indeks Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015-2016

No	Kabupaten	Indeks Kesehatan		Indeks EYS		Indeks MYS		Indeks Pendidikan		Indeks Daya Beli	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Lampung Barat	0,71	0,72	0,65	0,68	0,48	0,49	0,57	0,58	0,66	0,67
2	Tanggamus	0,73	0,73	0,66	0,66	0,46	0,46	0,56	0,56	0,63	0,65
3	Lampung Selatan	0,74	0,75	0,65	0,65	0,48	0,50	0,56	0,58	0,66	0,68
4	Lampung Timur	0,77	0,77	0,69	0,69	0,48	0,50	0,58	0,60	0,68	0,68
5	Lampung Tengah	0,75	0,76	0,68	0,68	0,48	0,49	0,58	0,58	0,71	0,72
6	Lampung Utara	0,74	0,74	0,69	0,69	0,51	0,51	0,60	0,60	0,62	0,64
7	Way Kanan	0,74	0,75	0,67	0,68	0,49	0,49	0,58	0,59	0,64	0,65
8	Tulang Bawang	0,76	0,76	0,62	0,64	0,47	0,47	0,55	0,56	0,70	0,70
9	Pesawaran	0,74	0,74	0,67	0,68	0,48	0,48	0,58	0,58	0,58	0,59
10	Pringsewu	0,75	0,75	0,71	0,71	0,52	0,52	0,62	0,62	0,67	0,69
11	Mesuji	0,73	0,73	0,60	0,62	0,41	0,41	0,50	0,52	0,59	0,60
12	Tulang Bawang Barat	0,76	0,76	0,64	0,67	0,45	0,46	0,55	0,56	0,61	0,61
13	Pesisir Barat	0,65	0,65	0,64	0,66	0,50	0,50	0,57	0,58	0,60	0,62
14	Bandar Lampung	0,78	0,78	0,74	0,76	0,72	0,73	0,73	0,74	0,73	0,74
15	Metro	0,78	0,79	0,79	0,79	0,70	0,70	0,75	0,75	0,72	0,73
Provinsi Lampung		0,77	0,77	0,68	0,69	0,50	0,51	0,59	0,60	0,66	0,67

Sumber: Badan Pusat Statistik

a. Dimensi Kesehatan

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia

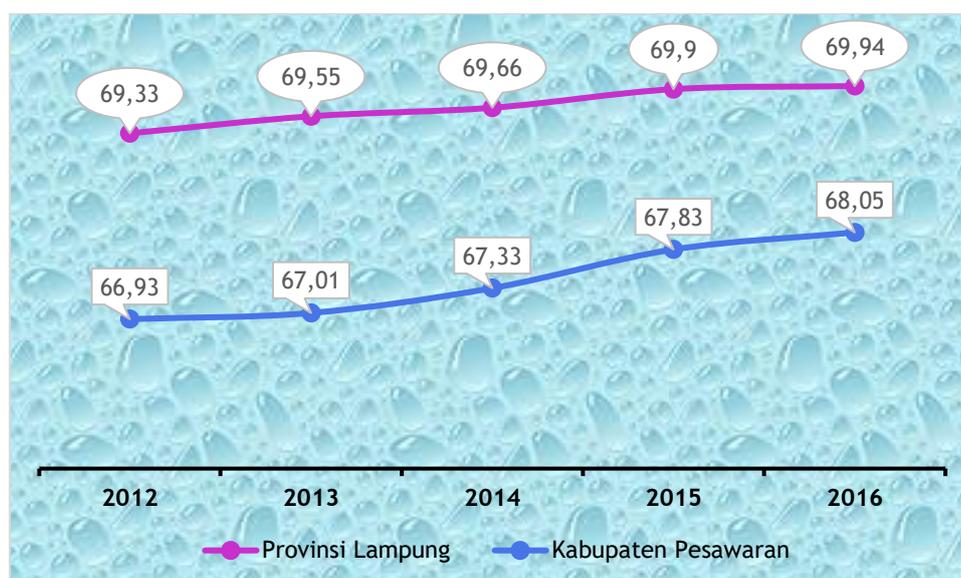
memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup (AHH) saat lahir (e_0). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka ini dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*), tetapi karena data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia, maka cara ini tidak dapat dilakukan. Dalam publikasi ini, perhitungan angka harapan hidup dilakukan dengan metode tidak langsung (*indirect method*).

Selama kurun waktu 2012 hingga 2016, angka harapan hidup Kabupaten Pesawaran terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pesawaran.

Selama periode 2012-2016, angka harapan hidup Kabupaten Pesawaran masih berada di bawah angka harapan hidup Provinsi Lampung. Meskipun demikian, dari Gambar 4.3 terlihat bahwa pertumbuhan angka harapan hidup Kabupaten Pesawaran lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Lampung.

Gambar 4.3. AHH Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung, 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2016, angka harapan hidup Kabupaten Pesawaran menduduki peringkat ke sebelas antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada tahun tersebut, angka harapan hidup Kabupaten Pesawaran sebesar 68,05 tahun. Hal ini berarti bahwa setiap bayi yang baru lahir pada tahun 2016 diharapkan dapat bertahan hidup sampai usia sekitar 68 tahun. Angka ini naik 0,22 poin dari tahun sebelumnya.

Gambar 4.4. AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan AHH ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan yang tersedia, peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, fasilitas lingkungan yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari serta kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri.

Beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016, antara lain: 2 rumah sakit, 12 puskesmas, 21 klinik/balai kesehatan, 438 posyandu, dan 13 apotek. Fasilitas kesehatan tersebut tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

Jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di Kabupaten Pesawaran menurun dari 1,92 persen pada tahun 2015 menjadi 1,43 persen pada tahun 2016. Jumlah bayi yang bergizi buruk juga menurun pada tahun 2016, yakni sebanyak 5 dari 7.981 bayi lahir.

Di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung, angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2016 berkisar antara 62,29 tahun hingga 71,05 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Metro, sedangkan angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat. Meskipun demikian, angka harapan hidup paling cepat tumbuh terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, yakni sebesar 0,40 persen. Jadi, meskipun kabupaten ini menjadi daerah dengan angka harapan hidup terendah, tetapi perkembangannya cukup cepat. Di sisi lain, angka harapan hidup tumbuh paling lambat terjadi di Kota Metro, yaitu sebesar 0,10 persen.

b. Dimensi Pendidikan

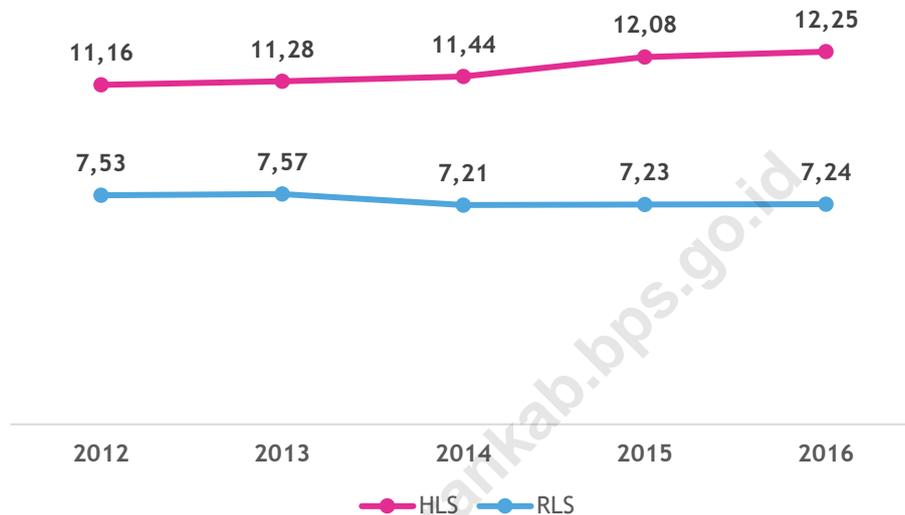
Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Dalam pembentukan angka IPM, komponen pendidikan merupakan salah satu yang sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dalam rangka pembangunan manusia. Komponen pendidikan diukur dari Indeks pendidikan yang terdiri dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator di bidang pendidikan yang dapat memberikan gambaran tentang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama kurun waktu 5 tahun, periode 2012-2016, harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesawaran menunjukkan peningkatan. Sampai dengan tahun 2016, harapan lama sekolah Kabupaten Pesawaran sebesar 12,25 tahun. Angka tersebut

menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,25 tahun atau mencapai Diploma I.

Gambar 4.5. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesawaran, 2012-2016



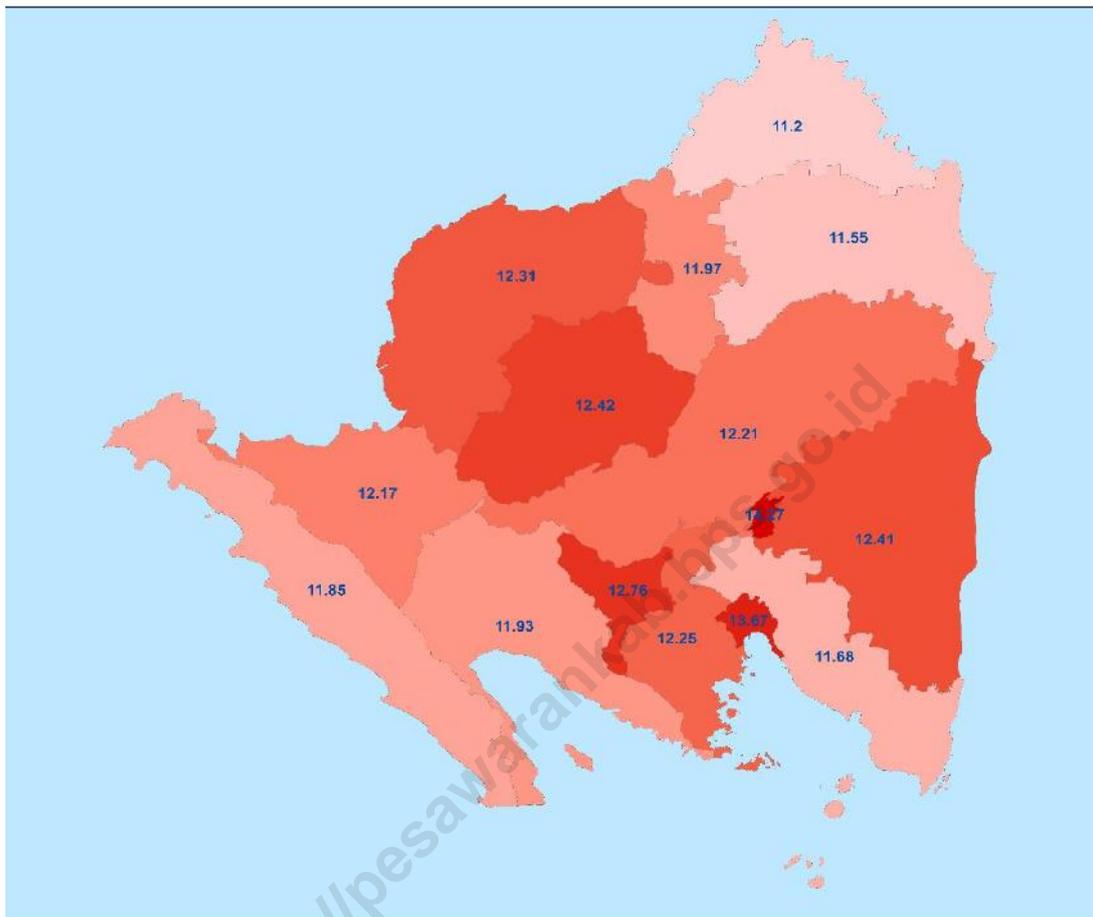
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain harapan lama sekolah, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu riil yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal/non formal.

Selama empat tahun terakhir, rata rata lama sekolah di Kabupaten Pesawaran cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 7,24 tahun atau setara dengan kelas VII.

Pada tahun 2016, harapan lama sekolah di Provinsi Lampung berkisar 11,20 tahun hingga 14,27 tahun. Harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Metro dan terendah di Kabupaten Mesuji. Harapan lama sekolah paling cepat tumbuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada periode yang sama, yakni sebesar 4,18 persen. Sementara itu, pertumbuhan paling lambat terjadi di Kota Metro, yaitu sebesar 0,07 persen. Adapun harapan lama sekolah di Provinsi Lampung sebesar 12,35 tahun.

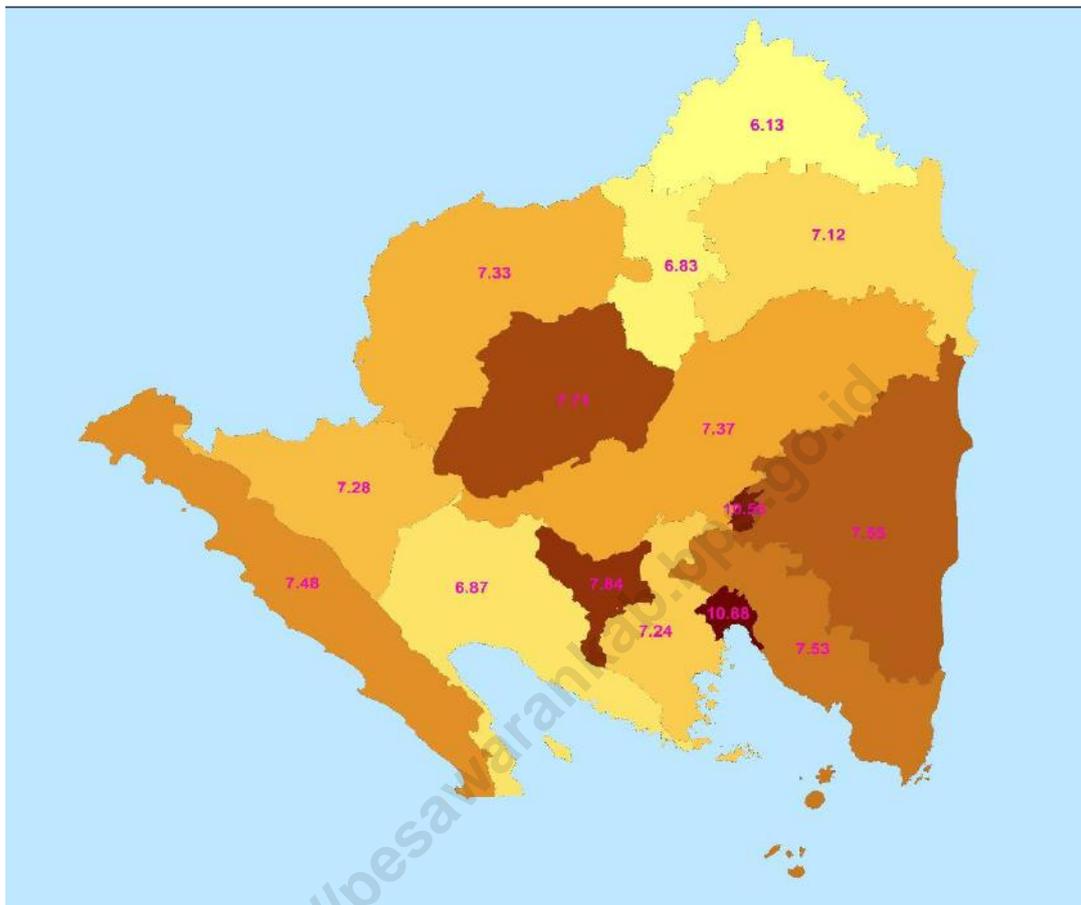
Gambar 4.6. HLS Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas Provinsi Lampung sebesar 7,63 tahun pada tahun 2016. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Lampung pada tahun 2016 berkisar 6,13 – 10,88 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung dan terendah di Kabupaten Mesuji. Pada tahun yang sama, rata-rata lama sekolah tumbuh paling cepat di Kabupaten Lampung Timur, yakni sebesar 4,86 persen. Sementara itu, pertumbuhan paling lambat, yakni 0,09 persen terjadi di Kota Bandar Lampung.

Gambar 4.7. RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai penduduk mampu mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa. Menyadari pentingnya pendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai program, di antaranya berupa pengembangan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan serta kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program nawacita presiden melalui program Indonesia Pintar.

Masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh Kabupaten Pesawaran, diantaranya tidak jauh dari pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi dan efektivitas terutama dalam pengelolaan pendidikan. Indikator lain yang digunakan untuk melihat masalah pemerataan pendidikan

adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator tersebut memberikan gambaran tentang upaya pemberdayaan penduduk dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah tentang tentang kualitas pendidikan yang bersifat pembangunan berkelanjutan hingga 2030. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian SDGs, yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Namun, peningkatan APS bukan berarti pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan juga meningkat.

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pesawaran, 2015-2016

	Tahun	7-12	13-15	16-18	19-24
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki					
	2015	99,36	94,83	74,32	13,69
	2016	100,00	98,01	65,16	18,58
Perempuan					
	2015	100,00	92,75	61,39	24,13
	2016	100,00	98,15	85,06	22,48
Laki-Laki + Perempuan					
	2015	99,67	93,81	68,04	18,47
	2016	100,00	98,07	73,74	20,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Pada tahun 2015 masih terdapat sekitar 0,33 persen penduduk Kabupaten Pesawaran usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak

bersekolah. Namun, pada tahun 2016 terjadi peningkatan sehingga seluruh penduduk Kabupaten Pesawaran pada usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan atau bersekolah. Perbedaan yang sangat terlihat antara APS penduduk laki-laki dan perempuan ditunjukkan pada usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Pada tahun 2015, APS penduduk laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, tetapi pada kelompok umur 19-24 tahun lebih rendah. Namun, pada tahun 2016, baik pada kelompok umur 16-18 tahun maupun 19-24 tahun, APS penduduk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Tabel 4.6. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pesawaran, 2015-2016

	Tahun	SD	SMP	SMA	PT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki					
	2015	92,68	77,00	65,80	4,72
	2016	100,00	72,49	59,70	3,89
Perempuan					
	2015	100,00	70,89	52,82	12,35
	2016	98,60	83,90	74,93	9,05
Laki-Laki + Perempuan					
	2015	96,22	74,02	59,50	8,21
	2016	99,32	77,88	66,26	6,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Indikator pendidikan lainnya, yakni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka ini membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Peningkatan APS diikuti pula dengan peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 di Kabupaten Pesawaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya

pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu. Pada tahun yang sama, APM SD sebesar 99,32 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 96,22 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usai 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang yang sedang mengikuti pendidikan sekolah dasar. Secara umum, APM SD, SMP, dan SMA meningkat dari tahun 2015. Namun, APM Perguruan Tinggi justru mengalami penurunan pada tahun 2016. APM penduduk perempuan lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki, kecuali pada APM SD.

APM merupakan salah satu indikator proses pada bidang pendidikan, sedangkan salah satu indikator outputnya adalah tingkat pendidikan penduduk. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan, serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Tabel 4.7 memperlihatkan kualitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari penduduk usia 15 tahun keatas.

Tabel 4.7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran, 2015-2016

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,31	1,21	3,40	3,42	2,33	2,27
Tidak Punya Ijazah SD	17,97	18,07	21,63	20,67	19,75	19,32
SD/Sederajat	31,47	40,00	29,33	36,97	30,43	38,54
SMP/Sederajat	27,84	18,59	26,68	18,39	27,28	18,50
SMA/Sederajat	18,44	19,06	15,17	15,60	16,85	17,39
Perguruan Tinggi	2,97	3,07	3,78	4,95	3,36	3,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah untuk mendapatkan kesempatan kerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Selama tahun 2015-2016, mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pesawaran merupakan tamatan SD/ sederajat. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP mengalami penurunan 32,18 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMA ke atas mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhan dan proporsinya masih kecil. Meskipun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pesawaran terlihat mengalami peningkatan yang relative masih rendah. Hal ini terlihat dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD turun pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

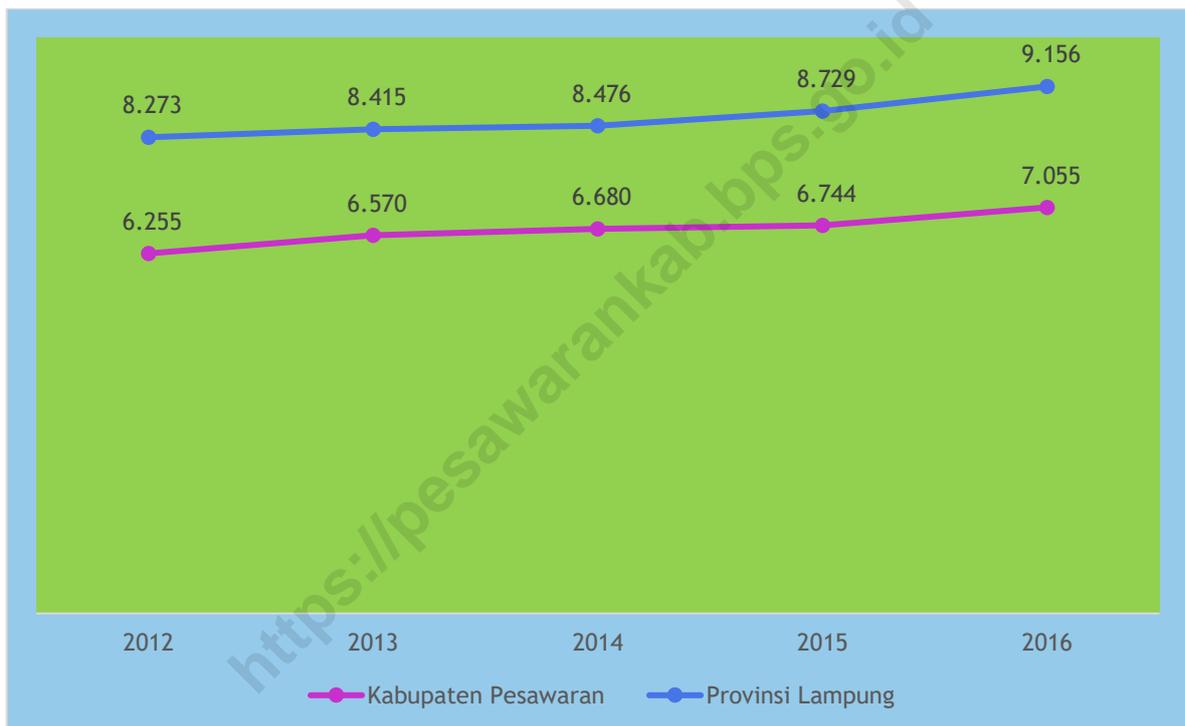
c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi, uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

Untuk mengukur bagaimana performa pembangunan manusia dari sisi ekonomi digunakan ukuran rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Nilai PPP menggambarkan daya beli penduduk Kabupaten Pesawaran yang dapat dibandingkan dengan daerah lainnya. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang, diharapkan kemampuan daya belinya semakin meningkat pula. Akan tetapi, bila dikaji lebih mendalam bahwa hubungan tersebut tidak selalu benar, terutama bila

tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah daripada tingkat kenaikan harga secara umum. Paritas daya beli juga sangat ditentukan oleh lokasi tempat tinggal seseorang. Dengan demikian, penduduk dengan pendapatan yang sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama juga, bila tempat tinggalnya berbeda wilayah.

Gambar 4.8. Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Pesawaran, 2012-2016 (000 Rupiah)



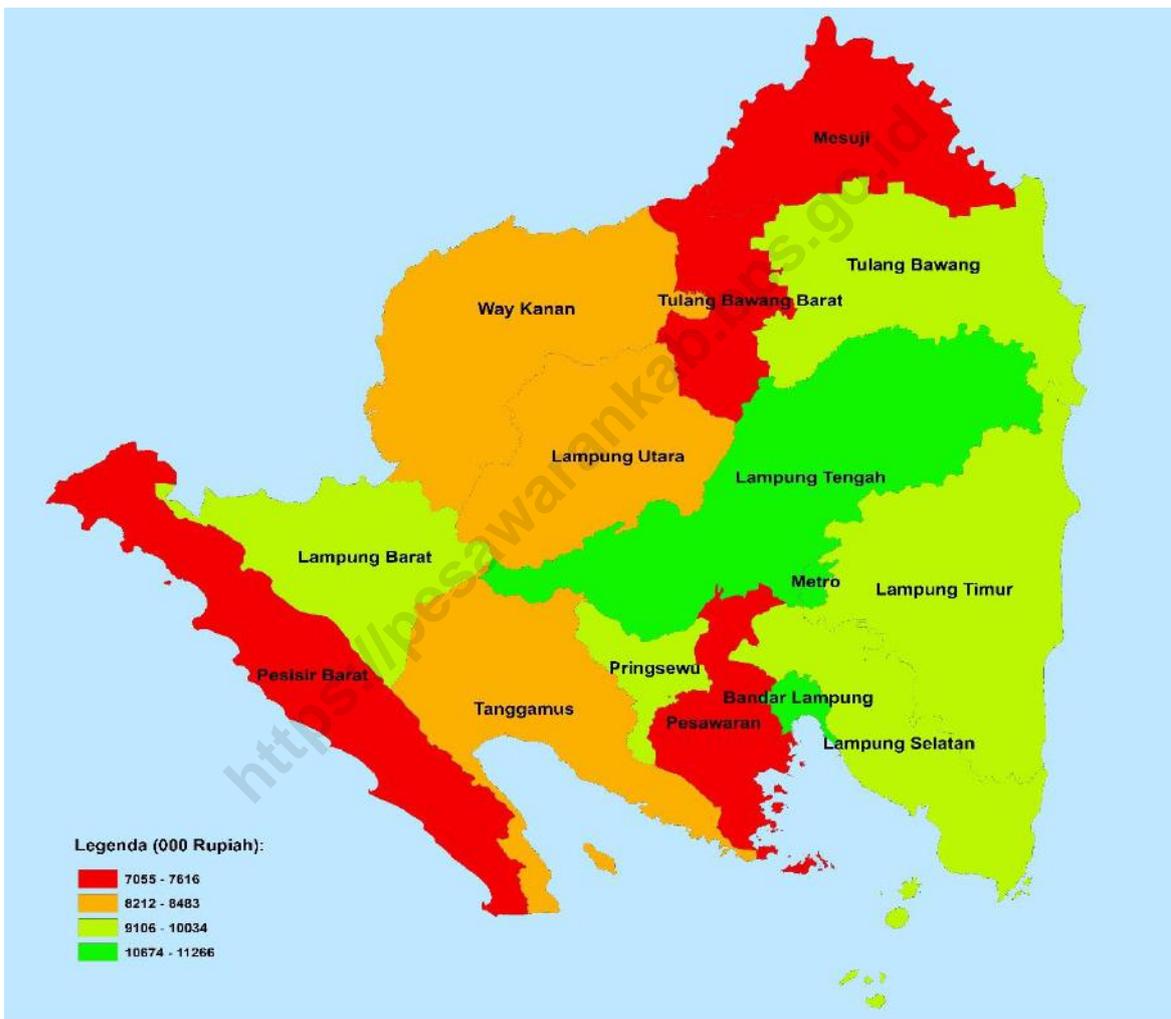
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2016, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Pesawaran mencapai 7,06 juta per tahun. Pengeluaran per kapita Kabupaten Pesawaran terus meningkat selama empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,20 persen per tahun. Selama kurun waktu tersebut, perkembangan Kabupaten Pesawaran lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang hanya sebesar 2,67 persen. Meskipun demikian, posisi Kabupaten Pesawaran masih selalu di bawah Provinsi Lampung.

Di tingkat provinsi, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2016 berkisar antara 7,06 juta rupiah hingga 11,27 juta rupiah. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Bandar Lampung dan terendah di Kabupaten

Pesawaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Pesawaran masih kalah cepat dibanding dengan Kota Bandar Lampung sehingga tingkat kesenjangannya besar.

Gambar 4.9. Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tidak dapat dipungkiri bahwa kota memiliki daya tarik tersendiri dibanding kabupaten. Kota menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Kemudahan akses yang tersedia di kota cukup banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik umumnya kota jauh lebih maju dibanding kabupaten. Hal ini terlihat dari status pembangunan manusia yang sudah “tinggi”.

DATA MENCERDASKAN BANGSA

<https://pesawaran.kab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 119 Kutoarjo

Gedung Tataan, 35371

Telp. (0721) 947111, e-mail: bps1809@bps.go.id

ISBN 978-602-6328-39-4



9 786026 329394